

PENDAMPINGAN KEBIJAKAN PUBLIK BAGI APARATUR DESA LAPODI KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON

Cecep Nuryadin¹⁾, Muh. Askal Baasir²⁾

Prodi Pendidikan Bahasa dan Sasatr Indonesia¹⁾

Prodi Ilmu Pemerintahan²⁾

Universitas Muhammadiyah Buton

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dari implementasi kebijakan aparatur desa di desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan bukan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Aspek yang berkenaan dengan inplementasi dan kebijakan di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Implementasinya adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat-akibat atau dampak nyata pada masyarakat Desa Lapodi. Pelatihan ini ditujukan bagi aparatur Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo dalam implementasi kebijakan publik ini termasuk dalam aktivitas pengembangan pegawai Desa Lapodi atau *employed development* yang merupakan salah satu alat yang sangat penting di dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Kegiatan pelatihan yang terus menerus dilakukan dapat meningkatkan prestasi kerja aparatur Desa Lapodi.

Kata Kunci, Impmentasi, Kebijakan Publik dan Aparatur Desa

A. PENDAHULUAN

Desa Lapodi, terletak di wilayah Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, dengan luas wilayah 280 hektar dan desa Lapodi terdiri dari 3 Dusun yaitu dusun Lapodi, dusun Labahawa satu dan Dusun Labahawa dua adapun jarak dari Kabupaten Buton yaitu 7 KM.

Secara Garapis Desa Lapodi berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapuntori
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lapandewa
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Saragi
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Warinta.

Secara umum, kondisi alam desa Lapodi mempunyai ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 800 meter dan curah hujan 1.5 mm/tahun. Wilayah ini menjadi salah satu desa di kabupaten Buton, yang menjadi objek Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu kebijakan pemerintah dan keberhasilannya tergantung pada tingkat *operational level of public administration*. Berdasarkan analisis situasi maka kami memilih Desa Lapodi sebagai salah satu desa yang perlu ditingkatkan kinerja aparatur publiknya dalam hal implementasi kebijakan publik, oleh karena itu kami memandang diperlukannya Pendidikan dan Pelatihan Implementasi Kebijakan Publik (*Public Policy Implementation*) Bagi aparatur Desa di desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

Administrasi Publik (*Public Policy Implementation*) adalah totalitas aktivitas diri kegiatan yang meelakukan pelayanan publik, baik dari sudut pandang publik, sudut pandang pemerintahan (eksekutif, legislatif, maupun yudikatf) dan dari sudut pandang stakeholders (pihak-pihak yang terkait dengan *sektor publik*). Salah satu kajian dalam administrasi Publik adalah studi dan praktik yang sangat erat kaitannya dengan proses kebijakan, yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan publik merupakan jembatan dari hubungan konseptual antara ilmu administrasi dan ilmu politik. Henry (*dalam Kartasmita, 1995:1*) yang menjelaskan bahwa kebijakan Publik berada di antara (*twilight zone*) disiplin ilmu administrasi dan ilmu politik. Selain itu Administrasi Publik juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan publik.

Kebijakan lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya. Dalam kaitan inilah maka mudah dipahami jika kebijakan itu acap kali diberikan makna sebagai tindakan politik.

Tujuan dari suatu kebijakan menurut Simmons (*dalam Syamsi, 1994:7*) dibagi menjadi tiga hal, yaitu (1) Untuk menjamin kepentingan umum secara optimal. (2) Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, (3) Kebijakan itu didorong oleh keinginan untuk menghindari efek sosial yang destruktif."

Berkenaan dengan kebijakan publik menurut Islamy (2003:2) mengemukakan bahwa Pemerintah memegang peranan sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik, hanya pemerintah lah yang secara sah dapat berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diupayakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa, yang oleh Easton disebut sebagai *Authorities in a political system* yaitu oleh para penguasa dalam system politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab.

Selanjutnya Islamy (2003:2) berdasarkan pengertian diatas, mengemukakan implikasinya sebagai berikut,

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk penetapan tindakan-tindakan pemerintah
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak hanya cukup dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata
3. Bahwa kebijakan publik baik untuk dilakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
4. Bahwa kebijakan publik itu senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan anggota masyarakat (*Islamy, 2003:2*).

James E. Anderson (1991:19) memberikan penjelasan mengenai implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut, antara lain :

1. Bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan

pejabat- pejabat pemerintah

3. Bahwa kebijakan itu adalah mempakakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan melakukan sesuatu
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif, bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa

Pendapat di atas menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau bukanlah merupakan tindakan yang serba acak atau kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan, juga merupakan tindakan yang saling berkaitan dengan berpola yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Setiap kebijakan akan selalu mengandung risiko untuk gagal, menurut *Wahab* (2002:62) hal ini disebabkan:

1. Suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, karena mungkin pihak- pihak yang terlibat tidak dapat bekerja sama, atau permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, ehingga pelaksanaan kebijakan sukar untuk dilaksanakan
2. Adanya faktor eksternal yang tidak mendukung dapat dilaksanakan kebijakan tersebut, sehingga tidak mendapatkan hasil yang optimal, atau mungkin sejak awal kebijakan tersebut kurang tepat.

Terdapat empat faktor krisis tau variabel yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. *Edwar III* (1980:10) .1) *Communication*, 2) *Resources*, 3) *Disposition*, 4) *Bureaucratic structure*.

Dari keempat faktor tersebut mempunyai hubungan dan saling melengkapi, suatu kebijakan dalam pelaksanaan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan si pembuat kebijakan kalau didalamnya tidak ada unsur komunikasi untuk menyampaikan seluruh kebijakan baik terhadap pelaksana maupun terhadap masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh manfaat dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan akan selalu berpengaruh terhadap apa yang ingin dicapai, sehingga apabila suatu kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana akan membawa hasil yang optimal, sedangkan apabila suatu kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal, maka tujuan yang diharapkan tidak dapat diwajibkan.

Implementasi kebijakan sendiri sesungguhnya bukan sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut pula masalah konflik, keputusan, dan siapa memperoleh dari suatu kebijakan. Udoji (2002:45) dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan itu adalah suatu yang penting bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

Lebih lanjut Nakamura dan Diare (1990:194) mengatakan bahwa "hal-hal yang berkenaan dengan implementasi dengan kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus".

Dengan demikian implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Target grup, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementasi) baik organisasi maupun program

yang bertanggung jawab pengelola pelaksanaan dan pengawasan

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan sebenarnya merupakan realisasi aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui kebijakan yang telah ditetapkan sedangkan yang dimaksud dengan studi implementasi merupakan suatu upaya untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan suatu kebijakan.

Pendidikan dan latihan yang ditujukan dalam implementasi kebijakan publik ini termasuk dalam aktivitas pengembangan pegawai atau *employee development* yang merupakan salah satu alat yang sangat penting di dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terus menerus dilakukan dapat meningkatkan prestasi kerja aparatur Desa Lapodi. Landasan penelitian ini memerlukan suatu kerangka pemikiran yang berupa teori, dalil, dan pendapat dari beberapa ahli, penulis akan mengemukakan pendapat dari beberapa pakar.

Latihan dan pendidikan sesungguhnya tidak sama, walaupun banyak persamaannya. Keduanya berhubungan dengan pemberian bantuan kepada pegawai, agar pegawai tersebut dapat berkembang ketinggian kecerdasan, pengetahuan dan kemampuan yang lebih tinggi. Pendidikan sifatnya lebih teoritis daripada praktis. Latihan lebih bersifat penerapan segera dan pengetahuan dan keahlian. Jadi lebih bersifat praktis.

Pengertian Pendidikan dan Latihan lainnya dikemukakan oleh Edwin B. Flippo yang dikutip oleh Moekijat dalam bukunya Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu "Latihan berhubungan dengan menambah pengetahuan dan kecakapan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu pendidikan berhubungan dengan menambah pengetahuan umum dan pengertian tentang seluruh lingkungan kita". (Moekijat, 1991:6)

Dari pengertian diatas penulis simpulkan bahwa pelatihan berhubungan dengan peningkatan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, sedangkan pendidikan berhubungan dengan ilmu dan pengetahuan akademik yang dimiliki oleh aparatur Desa Lapodi.

Manfaat dari pendidikan dan pelatihan menurut Moekijat dalam buku latihan

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja
2. Meningkatkan prestasi kerja pegawai
3. Meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi
4. Meningkatkan semangat kerja
5. Kesempatan pengembangan diri (Moekijat, 1991:57)

Dari pernyataan diatas, terlihat adanya keterkaitan antara pendidikan dan pelatihan dengan prestasi kerja aparatur Desa Lapodi, ya.tu bahwa salah satu manfaat dari pendidikan dan pelatihan in adalah peningkatan prestasi kerja aparatur Desa Lapodi dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik.

Perumusan Masalah

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Aparatur Desa Lapodi berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan publik.
2. Sumber daya yang dimiliki oleh Desa Lapodi berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan publik
3. Sikap aparatur Desa yang ditunjuk oleh aparatur Desa Lapodi berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan publik
4. Struktur birokrasi yang ada di Desa Lapodi berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan publik.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Meningkatkan aspek komunikasi yang dilakukan oleh Aparatur Desa Lapodi dalam mengimplementasikan kebijakan publik
2. Meningkatkan aspek sumber daya yang dimiliki oleh Desa Lapodi dalam mengimplementasikan kebijakan publik
3. Meningkatkan aspek positif dalam sikap aparatur Desa yang ditunjuk oleh aparatur Desa Lapodi dalam mengimplementasikan kebijakan publik.
4. Meningkatkan kinerja struktur birokrasi yang ada di Desa Lapodi dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

Sedangkan manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat lebih efektif dalam

merealisasikan implementasi kebijakan publik di Desa Lapodi

2. Program atau kebijakan yang dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat Desa Lapodi.
3. Target group; kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
4. Unsur pelaksana (implementasi) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab pengolahan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut menjadi lebih professional.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sasaran dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Implementasi Kebijakan Publik (*Public policy Implementation*) adalah seluruh Aparatur Desa dan unsur terkait di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Adapun jumlah peserta kegiatan adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Tabel 1

Daftar Peserta Pelatihan

Jabatan/Unsur Peserta	Jumlah (orang)
Aparatur Desa	6
Kepala Dusun	3
Ketua RT	8
LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	1
Karang Taruna	1
PKK, terdiri dari Pengurus	4
Petugas Puskesmas	2
Tokoh masyarakat	5
Jumlah	30

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Implementasi Kebijakan Publik dilaksanakan dengan bentuk Pendidikan dan Pelatihan melalui ceramah dan simulasi singkat seperti pada umumnya dilaksanakan, dengan waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari.

D. PEMBAHASAN

Setelah pendidikan dan pelatihan maka diselenggarakan penilaian atau evaluasi oleh Tim PKM. Prosedur evaluasi pendidikan dan pelatihan terkait dengan kriteria-kriteria keberhasilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Hamalik sebagai berikut Evaluasi pendidikan dan pelatihan merupakan bagian yang penting dalam kurikulum, yakni sebagai usaha pengumpulan informasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan tentang kurikulum, baik secara keseluruhan maupun secara bagian-bagian. Untuk itu perlu disusun seperangkat instrument pengukuran tertentu. (Hamalik, 2000:54)

Evaluasi atau penilaian berfungsi untuk mengecek derajat efektivitas program, kesahihan, dan ketepatangunaan atas pengukuran, dan efektivitas pengajaran. Penilaian (evaluasi) pelatihan implementasi kebijakan publik berkaitan dengan pada empat hal aspek penilaian, yaitu:

1. Reaksi peserta menyambut dengan baik kegiatan pelatihan ini dan mengikutinya dengan sangat antusias.
2. Pelajaran, mempelajari fakta, prinsip-prinsip dan pendekatan yang tercakup dalam latihan.
3. Tingkah laku peserta dalam pekerjaan berubah karena mengikuti pelatihan dan dapat merubah aspek psikomotorik mereka dalam kehidupan organisasi sehari-hari.
4. Hasil, peserta pelatihan dapat mengimplementasikan kebijakan publik, perbaikan kinerja dalam pelayanan publik dan mampu membuat struktur birokrasi yang handal dalam melayani masyarakat.

Prinsip-prinsip evaluasi pelatihan:

1. Evaluasi telah dilakukan berdasarkan hasil pengukuran yang komprehensif, ini berarti bahwa penggunaan teknik pengukuran telah selesai.
2. Proses pemberian nilai pada peserta pelatihan implementasi kebijakan publik mengenal adanya dua macam orientasi yang dapat sejalan atau tidak sejalan. Kedua orientasi tersebut normal atau standar. Normal adalah patokan prestasi yang diperoleh dari suatu kelompok peserta pelatihan implementasi kebijakan publik tertentu. Standar adalah uraian operasional lengkap

mengenai tujuan-tujuan instruksional dari suatu materi yang diharapkan dan dapat dikuasai oleh peserta.

3. Kegiatan pemberian nilai telah menjadi bagian integral dari proses pembelajaran implementasi kebijakan.

Hasil evaluasi dari Implementasi Kebijakan Publik (*Public Policy Implementation*) bagi aparatur Desa Lapodi diperlukan informasi masukan bagi pengelola program dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk membuat keputusan edukatif, instruksional, diagnostik dan administratif, yang mendukung manajemen organisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut.

Implementasi kebijakan di Desa Lapodi sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut pula masalah politik, keputusan, dan siapa memperoleh apa dari satu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan publik di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton itu adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Hal-hal yang berkenaan dengan implementasi kebijakan di Desa Lapodi adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menterjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif di Desa Lapodi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh aparat Desa Lapodi
2. *Target Group*, Kelompok masyarakat Desa Lapodi yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan dalam hal pelayanan publik.
3. Unsur pelaksana (implementasi) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dalam proses implementasi tersebut.

Begitu pula dengan aspek sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya lainnya di Desa Lapodi yang mendukung terhadap implementasi suatu kebijakan, tanpa sumber daya yang optimal kebijakan tidak akan dapat terimplementasikan secara baik, Aspek struktur birokrasi di Desa Lapodi menjadi penting karena secara formal semua pekerjaan yang menyangkut publik atau masyarakat harus jelas pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi yang secara formal harus terstruktur sehingga kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik.

E. PENUTUP

Simpulan

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. *Target group*, Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
3. Unsur pelaksana (implementasi)

Hasil evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Implementasi Kebijakan Publik (*Public Policy Implementation*) Bagi aparatur Desa di Kelurahan Karang Pamulabg Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton diperlukan sebagai informasi masukan bagi pengelola program dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk membuat keputusan edukatif, *instruksional*, *diagnostik*, dan Administratif, yang mendukung manajemen organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustus Tulus, Moh, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Atmodiwiryo, Soebagio, 1993, *Manajemen Training*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dan Nimmo, 2000. *Komunikasi Politik*. Alih Bahasa: Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Darwin Muhadjir. 2000. *Pengatur Analisis Kebijakan Publik Wiliam N. Dunn*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamalik, Oemar, 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen*

- Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu, S.P., 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, I. 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Jones, Charles. 1994. *Pengatur Kebijakan Publik* Dialihbahasakan oleh Ricky Ismanto. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- London, M. 1989. *Managing The Training Enterprise*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Mustopadidjadja dan tjokroamidojo, Bintoro. 1991. Kebijakan dan Administrasi Pembangunan: perkembangan Teori dan Penerapan. Jakarta: LP3ES
- Mustopadidjadja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan evaluasi kinerja*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pemernitah dan Duta Pertiwi Foundation.
- Newstrom, John W & Keith Davis, 1996, *Perilaku dalam Organisasi*, Trj: Agus Dharma, Erlangga, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komutindo Gramedia.